

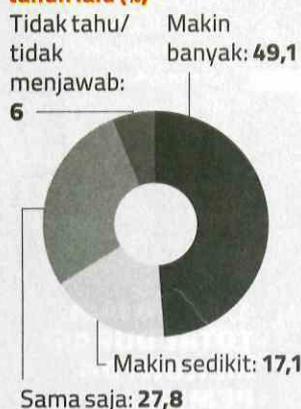
MAKIN BURUK PEMBERANTASAN KORUPSI

BURUKNYA kinerja pemerintah Joko Widodo-Ma'rif Amin dalam pemberantasan korupsi juga terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting. Kian negatif dibanding dua tahun lalu.

Kondisi pemberantasan korupsi (%):



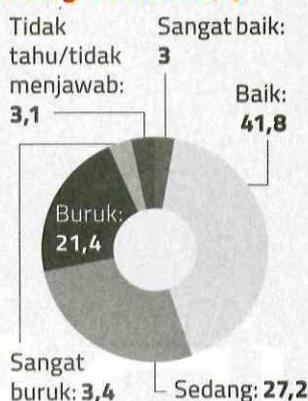
Korupsi dibanding tahun lalu (%)



Korupsi cenderung memburuk (%):

April 2019	47,6
September 2021	49,1

Penegakan hukum (%):



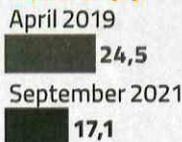
*SURVEI TERHADAP 1.220 RESPONDEN PADA 15-21 SEPTEMBER 2021 DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN 95 PERSEN DAN MARGIN OF ERROR + 3,19%.

20 Oktober 2019. Adapun Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menyoroti aksi *doxing* serta peretasan terhadap aktivis, jurnalis, dan akademikus. Pemerintah pun bertindak berlebihan saat mengejar para pembuat mural berisi kritik.

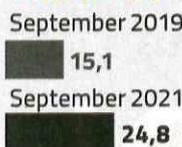
Rapor merah Jokowi-Ma'rif juga terlihat dalam pemberantasan korupsi yang kian melemah. Yang paling anyar adalah sikap Presiden Jokowi mendiamkan pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Jokowi, menurut Agus, seharusnya bisa mengembalikan status kepegawaian mereka. "Presiden memiliki kewenangan itu," ujarnya.

Kantor Staf Presiden (KSP) justru merilis laporan berjudul "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh 2021" yang mengklaim pemerintah menghormati kebebasan berpendapat. KSP mengutip indeks kebebasan pers yang meningkat dari 75,27 persen pada 2020 menjadi 76,02 persen. "Pemerintah menghormati kemerdekaan berpendapat dan independensi pers di atas koridor hukum dan etika." ❗

Korupsi cenderung menurun (%):



Penegakan hukum memburuk (%):



PERPUSTAKAAN KPK



Keterangan pers mengenai pengungkapan jaringan sindikat pinjaman *online* ilegal di Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Jakarta, 15 Oktober 2021.

POLISI USUT PINJAMAN ONLINE ILEGAL

KEPOLISIAN mengungkap 13 kasus pinjaman *online* ilegal di seluruh wilayah Indonesia hingga Jumat, 22 Oktober lalu. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisariss Jenderal Agus Andrianto mengatakan sejauh ini polisi telah menetapkan 57 tersangka. "Kasus itu diungkap Bareskrim dan sejumlah kepolisian daerah," katanya.

Menurut Agus, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan instruksi agar semua kepolisian daerah merespons cepat keluhan masyarakat terhadap pinjaman *online*. Ia mendorong para korban melaporkan peristiwa yang dialami.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan pinjaman *online* ilegal tak memenuhi syarat hukum perdata. Karena itu, mereka yang terjerat utang pinjaman *online* ilegal tak perlu membayar. ❗

22 Oktober 2021

DATA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK BOCOR

DATA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) disinyalir bocor dan diperjualbelikan di pasar data ilegal RaidForums. Data yang bocor itu berisi laporan pengaduan sejak 2016 hingga 2021. Dokumen sebesar 38 megabita itu dijual oleh akun C77 seharga Rp 70 ribu.

Pratama Persadha dari lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center mengatakan data yang seharusnya

rahasia itu berpotensi dimanfaatkan penjahat. Pelaku kekerasan bisa membalas dendam karena korban mengadu ke KPAI. "Harus ada forensik digital untuk mengetahui asal kebocoran," kata Pratama, Jumat, 22 Oktober lalu.

Ketua KPAI Susanto mengatakan lembaganya telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian RI serta Badan Siber dan Sandi Negara.



Ketua KPAI Susanto

"Kami telah melakukan mitigasi untuk menjaga keamanan data," ucap Susanto. ❗